

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan “*Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Presiden Bill Clinton Versus Presiden George W Bush*” yaitu faktor ekonomi dan pertahanan keamanan yang selalu menjadi fokus utama dalam struktur pemerintahan. Memang kedua faktor ini yang mendukung terwujudnya kepentingan nasional (*national interest*). Hampir tidak ada satu rezim di dunia ini, negara maju maupun negara berkembang. Tidak terkecuali negara super power dunia Amerika Serikat yang enggan mencantumkan ekonomi dan pertahanan keamanan pada *platform* pemerintahannya. Pasca perang dunia II, sebagian besar negara-negara di dunia dikuasai oleh militer. Kiranya tidak mengherankan, perang dunia II dan masa-masa berikutnya telah mengalihkan pemikiran-pemikiran Hubungan Internasional dari idealisme ke realisme. Dalam hal ini militer di terjunkan agar terciptanya keamanan dan perdamaian dunia. Militer secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya perang dan tidak bisa di pungkiri memang pada kenyataannya bahwa perang telah mendorong kemauan manusia untuk mencapai perdamaian.

Sepanjang periode setelah perang dunia II, tanggung jawab global Amerika Serikat mendorong tumbuhnya perhatian yang meningkat atas hubungan internasional di dunia bersumber pada perkembangan internasional yang cukup

pemerintah Amerika Serikat kemudian memperluas operasi-operasinya di bidang militer nasional, aliansi-aliansi dan bantuan juga pertumbuhan ekonomi negara-negara asing yang sudah barang tentu hal ini menguntungkan Amerika Serikat untuk menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk mengambil suatu pandangan global agar tidak kembali kepada isolasionisme dari periode antara dua perang dunia. Untuk pertama kalinya, penguasa-penguasa Amerika Serikat menyadari pentingnya perdagangan internasional dan kemungkinan-kemungkinan penanaman modal di negara lain.<sup>1</sup> Politik Luar negeri Amerika Serikat selama perang dingin berfokus pada keamanan nasional yang di pandang identik dengan keamanan internasional. Berbeda dari pengertian keamanan sebelumnya, yang hanya mengandung dimensi militer, sekarang istilah itu mempunyai dimensi-dimensi politik, dan diplomatik, ekonomi, sosial dan militer. Jadi keamanan nasional yang merupakan fokus dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai kebijakan-kebijakan terpenting diantaranya adalah kebijakan diplomatik, kebijakan ekonomi dan kebijakan militer.

Amerika Serikat sebagai negara maju selalu lebih unggul dalam segala hal. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat berada pada ranking nomor satu dunia. Secara umum Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang paling kaya di samping negara paling maju. Selama berpuluh-puluh tahun mata uangnya menjadi tolak ukur standart mata uang dunia, pertanda betapa stabil dan kuatnya mata uang dollar itu. Amerika Serikat memiliki GNP sebesar US\$ 9.255 trilyun, jumlah mana

sama dengan seperempat Gross Global Produk(GPP) yang diterima dunia setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Dalam bidang keamanan Amerika lebih-lebih tidak mau ketinggalan, walaupun sempat kebobolan yakni hancurnya gedung kembar(pusat perdagangan AS) yang di kenal sebagai gedung WTC(*world Trade Centre*). WTC di bom oleh sekelompok teroris dan yang menjadi tersangka utamanya adalah Osama Bin Laden yang sampai pada saat ini pun belum dapat di bekuk atau di tangkap oleh pemerintah Amerika. Akan tetapi, setelah kejadian ini Amerika seolah-olah di beri cambukkan yang sangat kuat agar tidak lalai lagi. Dalam setiap tindak tanduknya Amerika terkesan sangat berhati-hati dalam melaksanakan politik luar negerinya. Peningkatan pertahanan dan keamanan melalui militer, Amerika memfokuskan diri dalam masalah ini yang lebih parah lagi Amerika menempatkan militernya ke negara-negara yang di anggapnya mengancam kepentingan nasional negara Amerika. Militer terdiri dari “sekelompok atau beberapa kelompok orang yang bersenjata, terlatih, digaji dan di perintah oleh negara, dengan organisasi dan tugas yang tetap”, bahwa pemerintah yang sah mengontrol semua cara-cara kekerasan(termasuk polisi, keamanan, patroli perbatasan dan kekuatan-kekuatan yang bersifat kemiliteran).<sup>3</sup>

Amerika Serikat dalam pengiriman pasukan militernya ke negara-negara di dunia yakni militer melakukan peran non-tempur, termasuk bantuan bencana alam, keamanan dan kebijakan internal, pembangunan ekonomi dan pelayanan kesejahteraan sosial. Di Amerika misi non-tempur ini tidak membuat militer

<sup>2</sup> H.M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Senior*, Pustaka Warga Negara, Jakarta, 2002, hal

<sup>3</sup> Larry Diamond & Marc F. Plattner (ed), *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidas*  
Basis Cendeki Bangsa, Jakarta, 2001, hal 36

melakukan intervensi di bidang politik atau mengurangi kemampuan militer untuk mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Lagi pula, melihat berkurangnya ancaman keamanan dan menyebarnya demokrasi, banyak negara tidak punya pilihan lain kecuali mencari alternatif bagi misi lembaga militer mereka, termasuk Amerika Serikat. Namun belakangan ini Amerika dianggap sebagai negara yang kejam. Mungkin ; hal ini di sebabkan oleh personalitas atau watak pemimpin Amerika. Setidaknya dengan memahami beberapa aktor penggerak demokratisasi di Amerika Serikat, akan ditarik pemahaman yang mendasar untuk bagaimana proses kepemimpinan membentuk Amerika Serikat yang maju dan paling kaya di dunia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman politik, yang terjadi di Amerika Serikat serta bagaimana pengaruh personalitas presiden terhadap perkembangan ekonomi dan keamanan yang terjadi di negara super power ini.
2. Penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama dibangku kuliah.
3. Penulis ini merupakan suatu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

UIN Ar-Raniry Cirebon

### C. Latar Belakang Masalah

Penghujung tahun abad kedua puluh di tandai oleh tiga perkembangan histories, yang mempengaruhi dan mengubah politik dunia. Menyebarnya demokrasi, ambruknya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin. Amerika Serikat adalah Negara Super Multirasial : dihuni oleh semua ras dan dari anekaragam manusia di seluruh dunia. System politik terkenal sangat demokratis dengan azas yang benar-benar luber (langsung, umum, bebas, rahasia).<sup>4</sup> Banyak negara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tolak ukur dan standart dari kehidupan kenegaraan yang ideal. Namun belakangan ini di bidang politik internasional Amerika menjadi sangat congkak dalam menangani berbagai isu-isu internasional khususnya setelah perang dingin. Sulit membicarakan peranan Amerika dalam dunia yang tidak menentu sejak berakhirnya perang dingin. Keadaan dunia pasca perang dingin relatif mantap, terarah, dan konsisten, berbeda dari banyak pendapat yang menilainya sebagai suatu politik luar negeri yang bersifat ad hoc. Perubahan-perubahan yang lebih merupakan perubahan-perubahan nuansa, penekanan, cara dan gaya politik luar negeri. Hal ini tergantung dari ideologi presiden, partai yang berkuasa dan penilaian keadaan internasional pada suatu kurun waktu tertentu.

Dengan berakhirnya Era Perang Dingin, kebijakan luar negeri AS memasuki tahapan baru. Pada tahapan berakhirnya PD peta dunia internasional mengarah pada liberalisasi perdagangan (ekonomi) dan isu-isu pelanggaran HAM. Perhatian penuh terhadap isu-isu baru tersebut, tampak jelas kontras dengan

<sup>4</sup> H. M. Juna Cahya, *Di luar Diktator Soviet*, Duta Pustaka Wajana Negeri, Jakarta, 2002, h.

situasi sebelum Perang Dingin berakhir, dimana Pemerintah AS cenderung menganggap isu-isu politik dan persaingan senjata sebagai urusan yang paling utama dalam setiap kebijakan.

Sepanjang Perang Dingin kebijakan luar negeri AS lebih banyak di pengaruhi oleh pertimbangan kepentingan nasional Amerika, yakni ancaman Komunis Soviet. Dapat dikatakan bahwa AS jauh lebih tertarik untuk menghadapi ancaman Komunis US dan Cina daripada isu-isu politik lain yang jauh dari pertimbangan keamanan internasional. Oleh karena itu, isu-isu ekonomi kurang menjadi perhatian AS dan pada umumnya diabaikan.

Berakhirnya Perang Dingin membawa tantangan-tantangan baru bagi AS. Berbagai konflik regional dan Perang Saudara mulai timbul diberbagai belahan dunia dari Yugoslavia sampai Rwanda. Amerika Serikat juga dihadapkan pada kenyataan bahwa kapabilitas serta daya saingnya dalam bidang ekonomi mulai tersaingi oleh raksasa-raksasa ekonomi baru di Eropa dan Asia. Masalah-masalah domestik seperti anggaran belanja, defisit perdagangan dan masalah kesejahteraan sosial juga menuntut perhatian yang lebih besar dari pemerintah AS.

Amerika serikat berbentuk Republik yang di kepalai oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan yang amat besar dan di pilih langsung oleh rakyat. Negara adidaya tunggal ini telah mengalami banyak pergantian kepemimpinan. Pasca Perang Dingin AS dipimpin oleh Presiden ke-41 George Bush pada tahun 1989, 4 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1993, Bush digantikan oleh Bill Clinton sebagai Presiden AS pada 20 Januari 1993, Clinton menekankan komitmen pemerintahannya untuk mempertahankan peran aktif AS

masalah kesejahteraan sosial tidak lagi menjadi perhatian besar dari pemerintahan AS. Peristiwa pemboman *World Trade Centre* (WTC) pada 11 September 2001, telah mengubah arah politik luar negeri AS yang memfokuskan pada masalah-masalah domestik dan kini arah politik luar negeri AS dibawah pimpinan George W Bush lebih menekankan pada isu-isu internasional. Isu internasional pada awal tahun 2001 telah mengarah pada isu pertahanan keamanan. Hal ini dipicu oleh pemboman WTC, George W Bush yang menjabat sebagai orang nomor satu AS diberi mandat untuk mengatasi berbagai masalah internasional karena secara tidak langsung dengan adanya pemboman pusat perdagangan AS akan berpengaruh pada perekonomian AS dan juga berakibat buruk pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Faktor inilah yang akhirnya digunakan Bush untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat, Bush meningkatkan keamanan di negaranya yang dalam setiap kebijakannya Bush cenderung menggunakan kekuatan militer.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat di ambil permasalahan sebagai berikut : “Apa yang menyebabkan kebijakan luar negeri Bill Clinton dan George W Bush cenderung berbeda?”

## E. Kerangka Dasar Teori

### 1. Model Aktor Rasional

Fenomena 'politik luar negeri sebuah Negara yang berubah', akan sulit dipahami penyebab-penyebab yang melatari, apabila tidak ada upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas pemikiran mengenai fenomena itu. Negara, sebagai aktor pengambilan keputusan politik luar negeri, bisa disederhanakan sebagai seorang aktor rasional. Dalam rangka memahami fenomena perubahan politik luar negeri<sup>5</sup> Amerika Serikat ini pula, tulisan ini akan memakai model, yakni Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison.<sup>6</sup> Model ini menganggap manusia sebagai pemecah masalah yang rasional melalui eksplorasi proses-proses intelektual dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Seorang pembuat kebijakan berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada dengan menerapkan penalaran akal yang sungguh-sungguh. Model ini berasumsi bahwa para pengambilan keputusan luar negeri bisa mencapai keputusan atau menetapkan suatu kebijakan hanya melalui tugas-tugas intelektual yang diberlakukan, tanpa tunduk baik pada karakter psikologis manusia sendiri maupun tekanan-tekanan yang muncul akibat perannya dalam organisasi. Karakter

<sup>5</sup> Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan suatu tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan minimal dan maksimalnya tentang untung rugi serta baik buruknya. Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Politik luar negeri didefinisikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan situasi atau aktor yang ada diluar batas wilayah Negara. Dikutip dari Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisis*, Pusat Antar Universitas, Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989.

<sup>6</sup> Graham T. Allison, *Essence of Decision*, Little, Brown, 1971, yang dikutip Mochtar Mas'ood dalam bukunya, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 275-277.

psikologis manusia sendiri maupun tekanan-tekanan yang muncul akibat perannya dalam organisasi. Karakter psikologis manusia berkaitan dengan manusia dapat saja berbuat salah dan lupa, sementara tekanan yang muncul dari perannya di organisasi dapat berupa tekanan dari birokrasi, legislatif, ataupun yudikatif.

Pada saat pengambilan keputusan menetapkan alternatif yang akan diambil, maka pertimbangan yang digunakan adalah alternatif mana diantara sekian banyak alternatif paling mendatangkan hasil yang optimal. Dengan begini, para pembuat keputusan selalu siap melakukan adaptasi dan perubahan kebijakan apapun karena keuntungan yang akan diperoleh dan didapat lebih besar daripada seandainya ia tetap mempertahankan kebijakan terdahulu. Kebijakan masa lalu dapat saja berubah atau permanen tergantung dari besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Ini prinsip utama dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh aktor rasional. Demikian pula para pembuat keputusan politik luar negeri. Perubahan sikap atau dukungan yang diberikan kepada Negara lain selalu didasari pertimbangan optimalisasi keuntungan bukan kerugian.

Seperti yang terjadi pada pemerintahan Bill Clinton, bila ia sebagai aktor rasional tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang terdahulu dimana masa sebelum berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan internasional. Maka kepentingan nasional akan terancam karena pada pasca Perang Dingin isu-isu hak asasi manusia dan ekonomi telah menjadi perhatian dunia. Pemerintah AS mengetahui bahwa dunia internasional sangatlah berpengaruh terhadap terwujudnya kepentingan nasional, arah serta politik internasional juga merupakan salah satu penentu

luar negeri AS. Maka situasi ini dimanfaatkan oleh Clinton untuk menjalin kerjasama secara damai dengan Negara-negara yang dapat menguntungkan Negara yang dipimpinnya, seperti memperluas hubungan ekonomi dengan Negara-negara anggota ASEAN, selain itu juga Polandia dan Turki di Eropa, Meksiko, Brazil dan Argentina di Amerika Latin, serta Negara-negara lain yang dinilai Clinton dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi Amerika Serikat.

Sedangkan bila dibandingkan dengan George W Bush, alternatif yang diambil oleh Bill Clinton sebagai aktor rasional jauh berbeda dengan dirinya, esensi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada eranya adalah penekanan pada pengelolaan dan penggunaan kekuatan militer sebagai alat kebijakan luar negerinya. Arah kebijakan luar negeri George W Bush ini dengan sendirinya juga menyebabkan terpinggirnnya isu-isu hak asazi manusia dari perhatian para pengambil keputusan kebijakan luar negeri Amerika. Seperti dalam menghadapi peristiwa 11 September 2001 yakni pemboman WTC, Bush beralternatif bersikap keras dan menjalin hubungan dengan Negara-negara yang dapat mengoptimalkan kebijakannya, Amerika bersekutu dengan beberapa Negara yang ada di Eropa (Inggris, Jerman) dan Austaralia untuk mendukung dalam memerangi terorisme yang telah mengancam keamanan nasional Amerika bahkan mungkin mengancam keamanan internasional. Bush juga mampu mengaitkan bahwa Negara Irak sebagai gembong teroris dan George W Bush menuduh bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal sehingga dapat melegalkan serangan terhadap Negara Irak. Bush bermaksud untuk melindungi properti Negara namun kebijakan yang diambil oleh Bush ini ternyata telah menimbulkan

bagi negaranya, yaitu pemusatan pada keamanan menyebabkan banyaknya pengeluaran anggaran militer.

Kedua presiden Amerika ini mempunyai pandangan dasar yang berbeda dalam memimpin negaranya, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Bill Clinton dan George W Bush sangatlah berbeda dalam menganut Ideologi politik.<sup>7</sup>

### Perspektif Realisme

Realisme memiliki akar pemikiran yang sangat tua, kritikan tajam terhadap pandangan idealisme/liberalisme di era pasca Perang Dingin dan pengaruhnya yang kuat di era Pasca Perang Dunia II. Penggunaan istilah Realisme dilawankan dengan Idealisme "*Wishful Thinking*" tidak sesuai dengan realita. Realisme klasik lebih menekan pada politik internasional yang merupakan *struggle for power* yang terjadi terus menerus yang berakar pada hakekat manusia itu egois "*animus dominand*" yaitu nafsu untuk berkuasa. Tokohnya yaitu Thucydides, Morgenthau. Bila dikaitkan dengan karakter presiden Amerika Serikat George W Bush pandangannya sama dengan realisme klasik ini, sebagai bukti nyata terhadap Terorisme Bush bersikap *pre-emptive strike* (serangan pendahuluan) dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasional AS. Dalam menghadapi terorisme Bush sepertinya tidak ingin membicarakan keadilan namun lebih menekankan pada balas dendam sehingga banyak sekali Negara-negara yang

<sup>7</sup> Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mengarah secara sah tingkah laku masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Ideologi politik itu sendiri merupakan himnunan nilai ide norma kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan proble

menjadi kambing hitam dituduh sebagai sarang teroris termasuk Negara Indonesia.

Dalam pandangan Realisme klasik bahwa prinsip harus disubordinasikan dari kepentingan praktis. Negarawan harus menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan konfigurasi power dalam politik internasional. Dalam masalah ini George W Bush menyesuaikan politik luar negerinya dengan keadaan politik internasional, dimana Bush menjadikan peristiwa 11 September 2001 (WTC) sebagai *milestone* (tonggak bersejarah) atas perubahan politik luar negeri kaum imigran tersebut.<sup>8</sup> Strategi politik luar negeri yang *pre-emptive strike* tersebut semakin menguatkan politik luar negeri AS yang unilateralis.<sup>9</sup>

Pandangan dasar kaum Realis yakni :

- Statism : Negara adalah aktor utama dalam politik internasional, aktor lain dianggap aktor sekunder. Prinsip kedaulatan menegaskan interpendensi Negara yang memiliki otoritas yuridis internal terhadap wilayahnya.
- Survival : Tujuan utama semua Negara adalah kelangsungan hidup yang merupakan "*national interest*" utama. Kepentingan ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Dipandang sebagai "*Low Politics*" (sekunder).
- Self Help : Untuk survival Negara harus mandiri tidak menggantungkan diri pada Negara lain. System yang anarkis tidak memungkinkan adanya persahabatan sejati atau saling percaya.

Kunjungan Jiang Zemin kala itu sebagai balasan atas sikap manis Bill Clinton terhadap negaranya dan akan menjadi basis bagi hubungan bilateral kedua Negara, basis yang akan membawa kedua Negara ke dalam era baru yang saling menguntungkan, khususnya dalam perdagangan dan ekonomi.

- **Liberalisme Institusional** : Membicarakan masalah lembaga (arti pentingnya lembaga bagi perdamaian dunia). Lembaga dimaksudkan untuk mentransformasikan politik internasional yang anarki agar menjadi lebih lunak. Dalam pandangan liberal lembaga bukan hanya sebagai alat Negara besar saja, tetapi sekarang perannya lebih kompleks.
- **Liberalisme Republik** : Perang terjadi karena karakter politik Negara tidak demokratis, hal ini menyangkut politik internal suatu Negara. Dalam pandangan liberal Demokrasi itu unik; konflik didunia itu perlu ada, tetapi, diselesaikan secara damai bukan dengan kekerasan. Bila dikaitkan dengan keputusan Amerika Serikat menginvasi Irak pada masa kepemimpinan Bush, hal tersebut dapat dibenarkan atau sah-sah saja menurut liberalisme republik.

Bila disimpulkan secara umum bahwa dalam pandangan liberal semakin banyak demokrasi, maka dunia akan semakin damai, perdagangan bebas akan meningkat, kemakmuran juga menimbulkan ketergantungan antar Negara, serta menciptakan institusi atau lembaga dan tinggalkan *balance of power*. Ke semua hal ini telah terbukti pada pemerintahan Bill Clinton yang berlandaskan sama dengan kaum

## **F. Hipotesis**

Dengan mengaitkan permasalahan dan teori, penulis mengajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bill Clinton lebih menekankan pada aspek-aspek ekonomi dalam kebijakan luar negerinya.
- b. George W. Bush lebih menekankan pada isu-isu keamanan dalam kebijakan luar negerinya.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode penelitian dengan cara metode studi kepustakaan, yakni dengan memanfaatkan data-data sekunder yang di peroleh dari buku-buku, Koran, majalah, daan media elektronik baik internet maupun televisi serta berbagai tulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan batasan waktu pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton (1993-2001) dan pada masa pemerintahan George W. Bush (2001-2005), selain itu juga memasukkan fenomena-fenomena politik yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang daan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di luarnya, yang mempunyai relevansi kuat dengan maksud untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah hasil karya tulis ini maka perlu adanya penyusunan yang teratur dan sistematis. Hal ini di maksudkan agar penyajian karya tulis ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Oleh karena itu, karya tulis ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II DASAR-DASAR POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Bab ini berisi tentang prinsip-prinsip dasar politik Amerika Serikat, sejarah politik luar negeri Amerika Serikat, dasar-dasar politik luar negeri dan karakteristik politik luar negeri Amerika, pemaparan tentang politik luar negeri AS yang mengalami maju mundur dalam perkembangannya.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL PRESIDEN AS BILL CLINTON DAN GEORGE W BUSH**

Bab ini menjelaskan tentang profil Presiden AS sebelum dan sesudah menjadi pemimpin negara Amerika, yang disertai dengan adanya rincian tugas-tugas kenpresidenan dan batasan-batasan sebagai presiden Amerika Serikat